

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72.
- Afandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Pekanbaru: Zanafala.
- Alfa, A. A. G. (2017). Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM PLS). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21–37.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Batubara, R. (2016). Village Government Corruption in-Post Decentralization: Democracy, Ethnic Diversity and Budget Authority. *Journal of Developing Economies*, 1(1), 44–57.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Diana, B. A. (2019). Analisis Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 126.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Gulo. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, L. K. (2016). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square), (1).
- Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020). *Indikator Pembangunan Desa di Indonesia : Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa*. Policy Paper.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Hidayati, N. A., Arifianto, D., & Nilogiri, A. (2019). Klasifikasi Status Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan Metode Naive Bayes. *Unmuh*

Jember.

- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1). Cogent. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. *Universitas GajahMada*, (20), 1–12. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias__20091015151431__2389__0.pdf
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)* (Ketiga.). Yogyakarta: Gava Media.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*
- Maani, K. D. (2009). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>
- Manaf, A. (2016). *Good Governance dan Pelayanan Publik. Komisi Pemberantasan Korupsi* (Vol. 1). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazsir, N. (2003). Good Governance, 4, 135–150.
- Permatasari, E., Hasan, K., & Sopanah. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (September), 186–194.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
- Rusdiyanti, I. (2018). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Desa Dan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Desa Bulupitu Kabupaten Malang, 13(1), 1–6.
- Santoso, B. (2020). Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Menerima 10 Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa. *Borobudur News*. Magelang. Retrieved from <https://borobudurnews.com/kejaksaan-magelang-terima-sepuluh-laporan-dugaan-korupsi-dana-desa/>

- Setiawan, A., Suwaryo, U., Rahmatunnisa, M., Unpad, P. P., Nanjung, D., Margaasih, K., Margamukti, D., et al. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung: Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati , Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Surono. (2014). Banyak Desa Tertinggal yang Perlu Dibangun. *Kementerian Desa PDDT*. Jakarta. Retrieved from <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1238/banyak-desa-tertinggal-yang-perlu-dibangun>
- Syah, B. A. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik. *Sosial*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang